

PERAN HUMAS DALAM MENINGKATKAN CITRA POSITIF PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN DPRD KABUPATEN NGANJUK

Deril Rosyid Al habib

Mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya,
e-mail: derilhabib@mhs.unesa.ac.id

Bambang Suratman

Dosen Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: Bambangsuratman@unesa.ac.id

Abstrak

Setiap instansi atau organisasi pasti membutuhkan citra yang positif atau baik dikalangan publik. Citra yang baik merupakan kebutuhan sebuah instansi atau organisasi, maka inilah yang menjadi salah satu tugas yang dilakukan oleh humas melalui program-program yang dilakukan. Karena kesuksesan yang diperoleh sebuah instansi itu tidak lepas dari humas yang mampu menjalankan perannya dengan baik. Demi terciptanya citra yang positif humas harus bisa menjalankan perannya dengan baik, karena DPRD merupakan suatu instansi yang sangat dibutuhkan oleh rakyat untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi disini humas harus bisa menciptakan, membangun, meningkatkan dan menjaga citra organisasi dikalangan publiknya, Humas mempunyai kewajiban menumbuh kembangkan hubungan yang harmonis dengan publiknya karena ini merupakan kegiatan humas untuk membangun keserasian hubungan yang baik agar tercipta citra yang baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran humas dalam meningkatkan citra positif pada lembaga pemerintahan DPRD Kabupaten Nganjuk, mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan citra positif lembaga pemerintahan DPRD Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 2 orang ahli dan satu orang triangulasi. Analisis data disini menggunakan model Miles dan Huberman dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran humas DPRD Kabupaten Nganjuk yakni sebagai fasilitator komunikasi, penasehat ahli, fasilitator pemecah masalah dan teknisi komunikasi sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Peran, Humas, Citra

Abstract

Every agency or organization definitely needs a positive image or good among the public. a good image is a need of an agency or organization, so this is one of the tasks carried out by public relations through the programs carried out. Because the success gained by an agency is inseparable from public relations who are able to run its role well. For the sake of creating a positive image, public relations must be able to carry out its role well, because the DPRD is an institution that is needed by the people to convey what the people want. So here public relations must be able to create, build, improve and maintain the image of the organization among the public, PR has the obligation to develop a harmonious relationship with the public because this is a public relations activity to build a good relationship to create a good image.

The purpose of this study was to determine the role of public relations in improving the positive image of government institutions in the DPRD districts Nganjuk. This type of research is qualitative descriptive. The subjects of this study were 2 experts and one triangulation person. Data analysis here uses the Miles and Huberman models using source triangulation. The results of this study indicate that the public relations role of the Nganjuk District DPRD as a communication facilitator, expert advisor, problem-solving facilitator and communication technician has gone well.

Keywords: Role, Public Relations, Image

PENDAHULUAN

Humas merupakan sebuah fungsi manajemen yang berfungsi untuk membangun serta menjaga hubungan baik antara organisasi dan publiknya, yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan sebuah organisasi atau instansi, disini humas didalam organisasi atau instansi juga harus bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan publiknya, baik publik didalam organisasi atau diluar organisasi.

Humas merupakan divisi yang memiliki andil besar dalam sebuah organisasi atau instansi, disini humas memiliki fungsi, tugas dan peran tersendiri yang berpengaruh besar terhadap kegiatan organisasi atau instansi. Di balik fungsi dan tugasnya, humas berperan sebagai komunikator dan juga untuk membangun citra organisasi atau instansi. Dari peran humas yang sudah dijabarkan sebelumnya peran humas terbesar bagi sebuah organisasi adalah menciptakan, membangun, meningkatkan dan menjaga citra organisasi dikalangan publiknya, Jadi Humas mempunyai kewajiban menumbuh kembangkan hubungan yang harmonis dengan publiknya karena ini merupakan kegiatan humas untuk membangun keserasian hubungan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Henny (2014), menyatakan bahwa Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat segera mengambil tindakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mengembalikan kembali citra pemerintahan yang memudar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan cara mengeluarkan *press release* dan *advertorial*.

Dalam sebuah instansi pemerintahan seperti DPRD Nganjuk juga sangat memerlukan citra yang baik dimata masyarakat, seiring berjalannya waktu masyarakat menjadi semakin kritis dengan apa yang dilakukan oleh instansi pemerintahan, karena masyarakat melihat banyaknya pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi, apalagi di kabupaten Nganjuk terjadi OTT KPK dengan tertangkapnya bupati dan beberapa pejabat, seperti yang sudah diberitakan di KOMPAS.com pada Selasa, 31 Juli 2018

bahwa Bupati Nganjuk ditetapkan tersangka kasus gratifikasi, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat harus menjadi lebih kritis. Bisa dibayangkan saat ini di media massa banyak memberitakan hal-hal yang buruk tentang lembaga pemerintahan dan ini mungkin akan sedikit mempengaruhi citra dikalangan masyarakat, pemberitaan buruk yang menyangkut lembaga pemerintahan ini mungkin sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Humas pemerintah harus berani memberikan informasi yang jelas, akurat dan terkini dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 7 Mei 2018 dengan masyarakat, bahwa citra DPRD Kabupaten Nganjuk kurang baik, karena menurut masyarakat, DPRD masih belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu sebagai wakil rakyat DPRD harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik agar persepsi masyarakat Nganjuk tentang DPRD Nganjuk juga ikut baik. Disinilah peran humas dibutuhkan, saat kepercayaan masyarakat mulai pudar, pihak humas harus bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan dan tetap menjaga agar citra nya tetap baik dikalangan publik atau masyarakat. Jika rasa kepercayaan masyarakat mulai pudar maka akan berakibat fatal, yaitu akan terganggunya stabilitas kehidupan masyarakat.

Lembaga pemerintahan seperti DPRD wajib memiliki citra yang baik, karena lembaga ini merupakan lembaga yang dipercayai publik atau masyarakat dalam menjalankan hal-hal yang menyangkut kenegaraan. Disini lembaga pemerintahan ada 3, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Disini lembaga legislatif bisa dibayangkan yang paling membutuhkan citra yang baik, karena lembaga legislatif yang anggotanya ini langsung dipilih oleh rakyat dan lembaga ini juga memiliki tugas atau fungsi yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat. Tujuan humas pada lembaga pemerintahan yaitu untuk membuat berbagai program pemerintahan yang dapat membentuk dan meningkatkan citra positif agar dapat memperoleh opini baik yang dapat menguntungkan lembaga pemerintahan agar rencana-rencana yang dimiliki

oleh lembaga pemerintahan dapat berjalan dan diterima oleh masyarakat dengan baik.

Jadi sudah saat nya peran humas di lembaga pemerintahan harus lebih dioptimalkan lagi. Pada lingkungan pemerintah ini humas merupakan juru bicara pemerintah. Peran yang strategis ini harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin untuk membangun opini yang baik ditengah masyarakat tentang pementahan dan apa yang akan di selenggarakan oleh pemerintahan. Disini humas harus bisa membentuk dan mengarahkan opini publik kepada citra yang positif.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan peran humas dalam meningkatkan citra positif pada lembaga pemerintahan DPRD Kabupaten Nganjuk; (2) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan citra positif pada lembaga pemerintahan Kabupaten Nganjuk; (3) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam meningkatkan citra positif pada lembaga pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan peran humas dalam meningkatkan citra positif pada lembaga pemerintahan DPRD Kabupaten Nganjuk. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan yang ada pada kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan dll, sehingga dapat dijadikan untuk suatu kebijakan demi kesejahteraan Bersama (Gunawan, 2014). Penelitian kualitatif ini dipilih karena dianggap mampu mendiskripsikan dan menjabarkan peran humas yang ada di lembaga pemerintahan DPRD Kabupaten Nganjuk, kelebihan serta kekurangan yang ada di dalam peran humas yang dijalankan sehingga mampu memberikan masukan yang positif dalam meningkatkan citra positif.

Objek dalam penelitian ini adalah peran humas dalam meningkatkan citra positif pada lembaga pemerintahan DPRD Kabupaten Nganjuk. penelitian ini menggunakan 2 orang staff humas, 1 anggota DPR dan 2 orang masyarakat.

Teknik pengumpulan data menggunakan (1) wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan; (2) Dokumentasi, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles and Huberman. Miles and Huberman yang meliputi: *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Penarikan Kesimpulan). Sedangkan untuk keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Pada lembaga Pemerintahan DPRD Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama kurang lebih satu bulan, maka langkah pertama adalah mendeskripsikan gambaran umum Pemerintahan DPRD di Kabupaten Nganjuk, kemudian peneliti akan menjawab tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Mendeskripsikan peran humas dalam meningkatkan citra positif pada lembaga pemerintahan DPRD Kabupaten Nganjuk. 2) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan citra positif pada lembaga pemerintahan Kabupaten Nganjuk. 3) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam meningkatkan citra positif pada lembaga pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

Peran Humas dalam Meningkatkan Citra Positif pada Lembaga Pemerintahan DPRD Kabupaten Nganjuk

Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian sesuai dengan pedoman wawancara. Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

Peran Humas dalam Meningkatkan Citra Positif Lembaga Pemerintahan

Peran Humas dalam Meningkatkan Citra Positif Lembaga Pemerintahan (1) **Penasehat Ahli (Expert Prescriber)** Humas atau hubungan masyarakat merupakan seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Humas DPRD Kabupaten Nganjuk berperan untuk menampung ide-ide atau aspirasi yang ditemukan dari permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk, kemudian ide-ide atau aspirasi tersebut akan ditampung oleh pihak humas untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa humas di DPRD Kabupaten Nganjuk telah menjalankan perannya sebagai penasehat ahli.

Sesuai yang diungkapkan Sari (2012) yang menyatakan bahwa salah satu peran humas yaitu sebagai penasehat ahli (*Expert prescriber*) artinya seorang humas harus memiliki pengalaman dan kemampuan yang tinggi untuk dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. (2) **Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator)** Ruang lingkup kehumasan dalam suatu instansi pemerintahan merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pemerintah. Humas memiliki peran sebagai fasilitator komunikasi antara pemerintah dan publiknya. Humas di DPRD Kabupaten Nganjuk telah menjalankan perannya sebagai fasilitator komunikasi dengan merancang semua komunikasi apa saja yang dilakukan oleh DPR dan memberikan informasi secara jelas kepada agar tercipta pemahaman publik, khususnya pemahaman publik mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak DPRD Kabupaten Nganjuk.

Hal ini sesuai dengan yang Sari (2012) yang menyatakan bahwa peran humas sebagai fasilitator komunikasi berarti seorang humas bertindak sebagai komunikator atau mediator

untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Sebagai penghubung antara pihak DPRD dengan masyarakatnya agar proses penyampaian informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak DPRD dapat berjalan dengan lancar dan baik maka humas DPRD Kabupaten Nganjuk melaksanakan peran humas dengan menyampaikan informasi ke publik internal maupun publik eksternal. (3) **Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Procces Fasilitator)** Peran humas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam terciptanya citra yang baik dimata masyarakat, keberadaan citra yang baik ini sangat penting bagi organisasi atau instansi pemerintahan maupun non pemerintahan. Sebagai fasilitator proses pemecahan masalah, Humas DPRD Kabupaten Nganjuk telah menjalankan perannya dengan baik. Humas DPRD Kabupaten Nganjuk berkolaborasi dengan pimpinan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dimasyarakat Kabupaten Nganjuk. Masalah yang muncul yaitu adanya isu-isu negatif dimasyarakat, jadi humas sangat diperlukan untuk menjadi penengah dan juga menjadi pemberi solusi agar masyarakat tidak membuat isu-isu negatif yang belum tentu kebenarannya.

Hal ini sesuai pernyataan yang diungkapkan Sari (2012) yang mengungkapkan bahwa peran humas sebagai fasilitator proses pemecahan masalah berarti humas membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat hingga mengambil tindakan eksekusi dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional.

Peran humas sebagai fasilitator proses pemecahan masalah sudah diwujudkan oleh humas DPRD Kabupaten Nganjuk dengan memberikan pelayanan yang baik, menampung aspirasi masyarakat, kritik dan juga saran, kemudian akan dirapatkan guna mencari solusi dari permasalahan yang ada. (4) **Teknisi komunikasi (Communication Technician)** Peran humas sebagai teknisi komunikasi memiliki perbedaan dari ketiga peran humas yang sebelumnya. Peranan teknik komunikasi berhubungan dengan bagaimana alur atau proses

seorang humas dalam melakukan kegiatannya dan dengan apa atau media apa yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu informasi kepada masyarakat.

Hal ini sesuai pernyataan yang diungkapkan Sari (2012) bahwa peran humas sebagai teknisi komunikasi berarti peran humas berkaitan dengan bagaimana teknik humas dalam mengkomunikasikan informasi ke publiknya. Alur kegiatan kehumasan di DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan masyarakat, kemudian dirapatkan terlebih dahulu dengan yang bersangkutan, kemudian baru dibuat rencana kedepannya itu seperti apa lalu diinformasikan kepada masyarakat kalau apa yang mereka inginkan sudah didengar oleh pihak DPRD dan akan direalisasikan kedepannya. Terkait media yang digunakan pihak DPRD menggunakan media cetak maupun media elektronik. Media cetak bisa berupa majalah dan Koran sedangkan media elektronik, bisa berupa media sosial dan website.

Guna menciptakan citra positif dimata masyarakat humas DPRD Kabupaten Nganjuk memberikan pelayanan yang baik, dan ramah serta saling menghormati satu sama lain, dengan demikian dapat memberikan kesan yang positif terhadap pelayanan masyarakat yang membutuhkan informasi.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Datuela (2013) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa untuk mempertahankan citra perusahaan humas harus menjalankan tugas-tugasnya dan strategi yang baik. Henny (2014) dalam jurnalnya mengatakan bahwa peran humas di Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yaitu dengan cara mengeluarkan *press release* dan *advertorial* guna mengembalikan kepercayaan dan citra pemerintahan yang mulai memudar di mata masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari triangulasi sumber yaitu Bapak Gatut Sugiarto selaku Kabbag per UU dan Dokumentasi bahwa untuk meningkatkan citra DPRD Kabupaten Nganjuk dimata masyarakat yaitu humas DPRD Kabupaten Nganjuk melaksanakan tugas dan perannya dengan baik serta memberikan sikap

yang ramah dan loyal ketika memberi pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Kegiatan Humas DPRD Kabupaten Nganjuk

Faktor yang menjadi kendala pada kegiatan humas DPRD Kabupaten Nganjuk yakni: (a) Tidak bisanya pihak DPRD mengontrol isu-isu yang berkembang di masyarakat Salah satu hambatan dalam melaksanakan peran *public relations* adalah tidak bisanya pihak DPRD mengontrol isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengenalan pihak DPRD terhadap masyarakat sehingga isu-isu negatif yang berkembang dimasyarakatpun juga tidak bisa dikontrol oleh pihak DPRD. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ruslan (2012) yang berpendapat bahwa *public relation* (humas) pada hakekatnya merupakan bagian dari teknik kegiatan berkomunikasi dengan ciri khas komunikasi dua arah antara lembaga atau organisasi yang diwakilinya dengan publiknya atau sebaliknya. Hal berbeda diungkapkan dalam hasil penelitian Lubis (2012) dalam jurnalnya yang mengungkapkan bahwa peran humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau belum dilakukan secara optimal karena pencapaian informasi cenderung satu arah. (b) Kurangnya media masa dalam kalangan masyarakat. Media komunikasi merupakan sarana yang digunakan oleh *public relation* untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Kurangnya media masa di kalangan masyarakat membuat seorang humas kurang maksimal dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rini (2017) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan citra yang positif maka petugas PR harus memperbaiki dari dalam secara internal dan juga memperbaiki dari luar eksternal. Hal berbeda diungkapkan Wulanjari (2015) dalam jurnalnya mengatakan bahwa selain media komunikasi yang menjadi faktor kendala minimnya anggaran juga menjadi faktor kendala karena peran *public relations* akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia serta adanya anggaran. Upaya yang

dilakukan pihak DPRD untuk mengatasi faktor penghambat adalah sebagai berikut: (1) Membuat program kegiatan yang membuat pihak DPRD Kabupaten Nganjuk terlibat kontak langsung dengan publiknya sehingga menciptakan hubungan yang baik (merakyat) dengan masyarakatnya; (2) Memanfaatkan seluruh media masa yang ada di kalangan masyarakat dalam menyampaikan informasi dari DPRD sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih luas kegiatan apa saja yang dilakukan DPRD Kabupaten Nganjuk sehingga menciptakan *image* keterbukaan antara masyarakat dengan pihak DPRD.

Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dalam Kegiatan Kehumasan

Faktor yang menjadi pendukung dalam kegiatan humas DPRD Kabupaten Nganjuk yakni: (a) Teknologi dan informasi komputer yang baik dan cepat. Perkembangan teknologi dan informasi komputer khususnya di bidang *online* dan media *online* sangat membantu humas untuk meningkatkan citra kantor. Hal ini dikarenakan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi kegiatan kehumasan di DPRD Kabupaten Nganjuk dapat berjalan dengan konsisten dan cepat khususnya dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Wulanjari (2015) dalam jurnalnya yang mengemukakan bahwa salah satu faktor pendukung dalam kegiatan humas yaitu pada teknologi yang digunakan. Dinas POPK Kabupaten Sukoharjo menggunakan media *online* untuk menginfokan kegiatan yang dilakukan Dinas POPK Kepada masyarakat. Mustafa (2017) dalam jurnalnya mengatakan bahwa teknologi informasi yang baik dan cepat sangat membantu humas kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dalam meningkatkan citra kantor khususnya dalam hal pemanfaatan media *online*. Hal berbeda diungkapkan (Herdiana, 2016) dalam jurnalnya yang menyatakan faktor pendukung untuk meningkatkan citra UIN Bandung yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa, dosen dan yang lainnya. (b) Menjalin hubungan yang baik dengan berbagai jurnalis media di Kabupaten Nganjuk. Kerjasama dengan berbagai pihak yang

berkepentingan menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan peran *public relations*. Adanya kerjasama antara DPRD Kabupaten Nganjuk dengan pihak-pihak yang berkepentingan sangat membantu dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan DPRD Kabupaten Nganjuk.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian (Wulanjari, 2015) yang menyatakan bahwa kerjasama yang baik dengan pihak yang berkepentingan sangat membantu dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Dinas POPK Kabupaten Sukoharjo. Mustafa (2017) dalam jurnalnya mengatakan bahwa menjalin hubungan yang baik dengan jurnalis media dapat membantu mempublikasikan kegiatan-kegiatan humas sehingga citra Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dapat ditingkatkan.

Hal berbeda diungkapkan Kaori (2013) dalam jurnalnya yang mengatakan faktor pendukung dari peningkatan citra perusahaan yaitu dengan meningkatkan kinerja pegawai dalam melayani penjual.

Humas merupakan fasilitator dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat sehingga pihak DPRD Kabupaten Nganjuk menjalin hubungan yang baik dengan berbagai jurnalis media di Kabupaten Nganjuk tujuannya agar humas DPRD Nganjuk bisa menyampaikan informasi ke publik dengan mudah mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan 3 (tiga) hasil yakni:

Pertama Peran humas DPRD Kabupaten Nganjuk yakni *penasehat ahli* Humas sebagai penasehat ahli yaitu berperan untuk menampung ide-ide atau aspirasi yang ditemukan dari permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk. Humas sebagai *fasilitator komunikasi* dengan pihak internal dan juga eksternal untuk menyampaikan informasi mengenai suatu kegiatan. Humas sebagai *fasilitator pemecah masalah* yaitu humas berperan menjadi pihak yang bisa memberikan solusi

dalam menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat. Kemudian humas sebagai *teknisi komunikasi* yakni mempublikasikan kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak DPRD Kabupaten Nganjuk..

Kedua Faktor-faktor pendukung dalam melaksanakan peran humas diantaranya adalah: 1) teknologi dan informasi komputer yang baik dan cepat dan 2) Menjalani hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan khususnya jurnalis media di Kabupaten Nganjuk.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran humas dalam meningkatkan citra positif pada lembaga pemerintahan DPRD Kabupaten Nganjuk, maka peneliti ingin memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat. Yaitu Humas dan juga pihak DPRD harus terus meningkatkan program sosialisai ke masyarakat dan juga lebih terbuka lagi agar tidak timbul isu-isu negatif dimasyarakat dan juga pihak humas harus melakukan survey kepuasan masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai DPRD Kabupaten Nganjuk dengan begitu DPRD Kabupaten Nganjuk akan dapat meningkatkan kenirjanya lagi dan akan lebih mudah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Datuella, Agnes. (2013). Strategi Public Relations PT. Telkomsel Branch Manado Dalam Mempertahankan Citra Perusahaan. *Jurnall*

Acta Diurna, 2(1).

Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Henny, Bernadeht. (2014). Peran Humas Dalam Membangun Citra Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat. *E- Journal Administrasi Reform*, 2(3).

Herdiana, D. &Khoiruddin. (2016). Peran dan Strategi Humas dalam Pembentukan Citra Perguruan Tinggi Islam. *Jurnal Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, 12(2).

Kaori, Tanako. (2013). A Case Study Of Effective public Relation. *Journal Public Relations Review*, 39(1).

Lubis, Evawati. E. (2012). Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1).

Moleong, J. Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mustafa, N. R. (2017). Strategi Humas dalam Meningkatkan Citra Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar. *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 6(2).

Rini, Kurnia. S. (2017). Peran Humas dalam Meningkatkan Citra Universitas Tribhuwana Tunggaladewi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1).

Ruslan, Rosady. (2012). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sari, B. W. N. (2012). *Humas Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wulanjari, N. (2015). Peran Public Relations Di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan (POPK) Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 3(1).